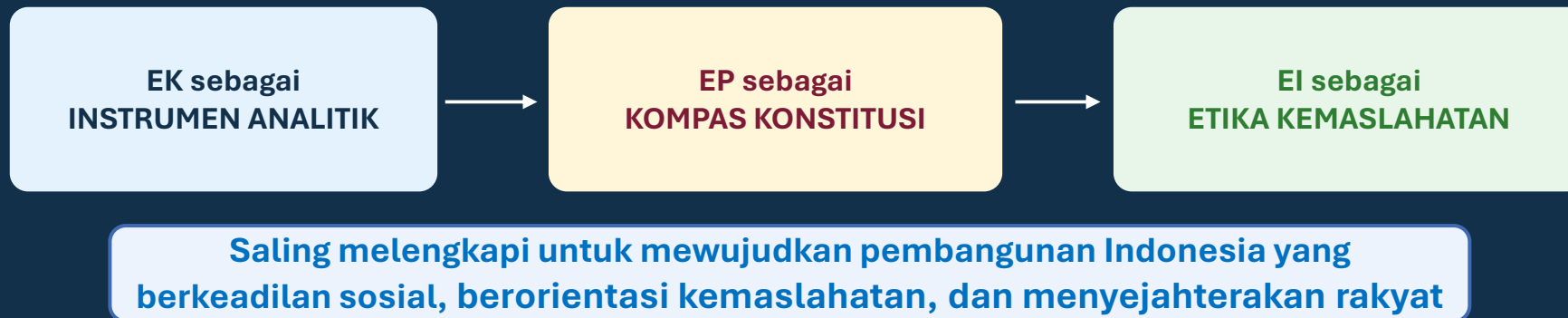


Ekonomi Konvensional Kontemporer

dan Titik Temunya dengan Ekonomi Pancasila & Ekonomi Islam

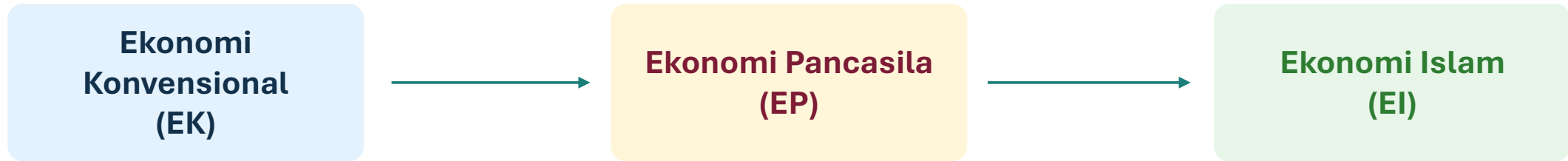
Menuju Pembangunan Indonesia yang Berkeadilan Sosial



Bambang Juanda
Guru Besar Ilmu Ekonomi, FEM IPB
Simposium IAEI × Kemenko Perekonomian × UIKA Bogor | 8 September 2026

Posisi Presentasi

Mengikuti TOR baru: kontribusi, keterbatasan, pembelajaran empiris, komplementaritas, dan implikasi kebijakan berkeadilan sosial.



Saya tidak menempatkan EK sebagai “ideologi pasar”, melainkan sebagai toolkit ilmiah untuk menganalisis pilihan, insentif, kelembagaan, data, dan dampak kebijakan.

Argumen kunci: EK kontemporer sudah bergerak jauh — dari asumsi manusia super-rasional menuju ekonomi perilaku, eksperimen, institusi, heterogenitas, dan evaluasi kebijakan berbasis bukti.

Filsafat Sains: Ekonomi sebagai Ilmu yang Berevolusi

Ontologi—Epistemologi—Aksiologi menjadi cara membaca dinamika EK, EP, dan EI.

ONTOLOGI

Apa realitas ekonomi?

EPISTEMOLOGI

Bagaimana kita tahu?

AKSIOLOGI

Untuk apa ilmu digunakan?

- Realitas: kelangkaan, pilihan, produksi, distribusi, kekuasaan, norma, perilaku manusia
- Pengetahuan: teori, data, model, eksperimen, simulasi, triangulasi
- Tujuan: kesejahteraan, keadilan, kemaslahatan, kebebasan, keberlanjutan

Kesan penting dari Filsafat Sains: paradigma ilmiah bukan dogma; ia berubah ketika anomali empiris, teknologi, dan masalah masyarakat berubah.

Apa Itu “Ekonomi Konvensional”?

Bukan satu mazhab tunggal; ia adalah keluarga pendekatan ilmiah yang terus berkembang.

Definisi kerja:

Ekonomi konvensional adalah ilmu yang mempelajari bagaimana individu, rumah tangga, perusahaan, pemerintah, dan masyarakat membuat pilihan dalam kondisi sumber daya terbatas, merespons insentif, dan menghasilkan konsekuensi bagi efisiensi, distribusi, stabilitas, serta kesejahteraan.

Bukan hanya pasar

Bukan hanya uang

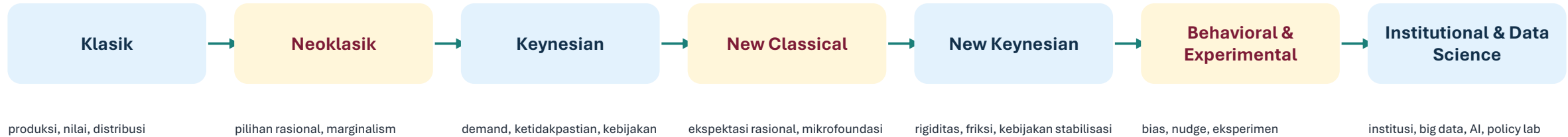
Bukan hanya pertumbuhan

Bukan bebas nilai

EK menyediakan bahasa analitik: scarcity, trade-off, incentives, institutions, market failure, externalities, welfare, distribution, and evidence.

Evolusi Pendekatan Ekonomi Konvensional

Dari “mesin rasional” menuju sistem adaptif manusia—institusi—data.



Catatan: perkembangan ini tidak menghapus mazhab lama; ia menambahkan koreksi atas anomali yang tidak mampu dijelaskan model sebelumnya.

New Classical vs New Keynesian: Debat yang Mematangkan Ilmu

Keduanya “konvensional”, tetapi berbeda dalam membaca pasar, friksi, dan peran kebijakan.

NEW CLASSICAL

- Ekspektasi rasional
- Pasar cepat menyesuaikan
- Mikrofondasi ketat
- Kebijakan sistematis terantisipasi

NEW KEYNESIAN

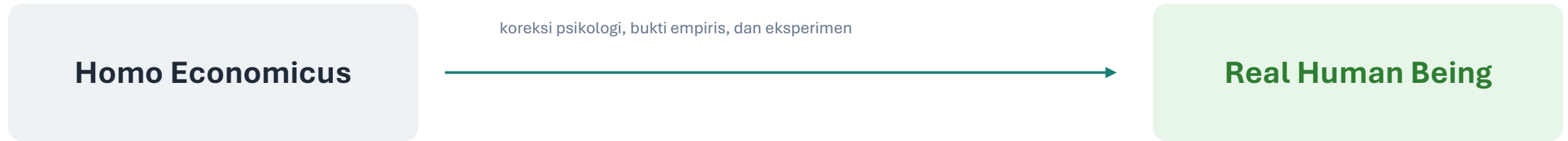
- Harga/upah kaku
- Friksi informasi & kredit
- Ketidaksempurnaan pasar
- Kebijakan stabilisasi dapat efektif

SINTESIS KEBIJAKAN MODERN
DSGE, friksi, ekspektasi, shock, aturan
kebijakan, kredibilitas

Implikasi untuk EP & EI: isu stabilitas, keadilan, dan kesejahteraan tidak bisa hanya didekati lewat moral; perlu model yang menjelaskan transmisi kebijakan dan dampaknya.

Behavioral Economics: Ketika Manusia Tidak Selalu Rasional

Koreksi utama terhadap homo economicus: manusia punya *bounded rationality*, bias, emosi, dan norma.



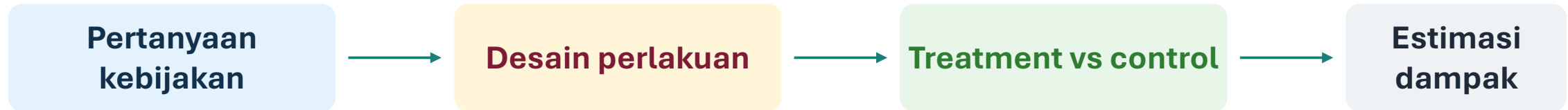
Behavioral economics menjelaskan mengapa kebijakan yang “rasional di kertas” bisa gagal karena framing, loss aversion, present bias, overconfidence, social norms, dan trust.

BE menyediakan cara empiris untuk melihat kapan norma itu bekerja, kapan gagal, dan bagaimana desain institusi dapat memperkuat perilaku yang diharapkan.

Kebijakan publik perlu desain perilaku: default, simplifikasi, komitmen, salience, social norm, dan trust.

Experimental Economics: Dari Opini ke Bukti Kausal

Eksperimen menjadikan kebijakan sebagai hipotesis yang diuji, bukan sekadar keyakinan yang diterapkan.



Contoh aplikasi: uji desain redenominasi, kepatuhan pajak, bantuan sosial, literasi keuangan, transformasi digital UMKM, dan insentif program daerah.

Kekuatan EK kontemporer: mampu menyambungkan teori → perilaku nyata → bukti kausal → perbaikan desain kebijakan.

*Nobel 2019 kepada Banerjee, Duflo, dan Kremer memperkuat **legitimasi pendekatan eksperimental untuk mengatasi kemiskinan**. Bagi kebijakan Indonesia, semangatnya jelas: **pilot, ukur, evaluasi, perbaiki, baru scale up***

Ekonomi Konvensional Kini Makin “Tidak Konvensional”

Mainstream modern menyerap kritik: institusi, ketimpangan, lingkungan, AI, dan kompleksitas.

Institutions
rules, power, incentives

Inequality
distribution matters

Climate & biodiversity
externalities, sustainability

AI & data science
prediction, targeting,
ethics

Complex systems
networks, adaptation

Policy evaluation
causality, impact, learning

ekonomi kontemporer semakin dekat dengan realitas sosial yang kompleks dan semakin terbuka pada pendekatan multidisiplin

Titik Temu dengan Ekonomi Pancasila

Pasal 33: “efisiensi berkeadilan” sebagai bahasa konstitusional untuk social efficiency.

(Makna: efisiensi produktif dan keadilan distributif saling memperkuat)

EK

bukan kompetisi, tetapi penerjemahan
instrumen ke tujuan konstitusi

EP

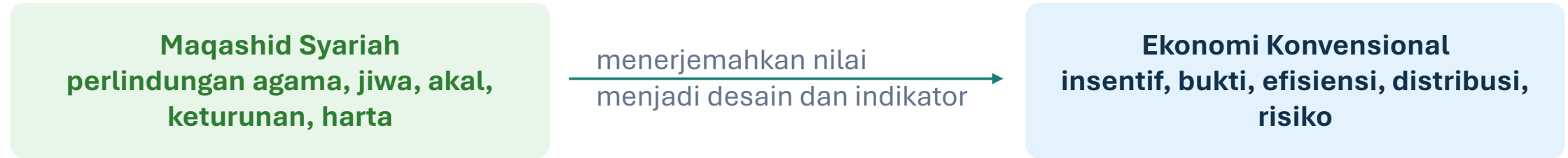
Titik temu:

- EK memberi alat: cost-benefit, incentive design, impact evaluation, model transmisi
- EP memberi tujuan: kemakmuran rakyat, kekeluargaan, keadilan sosial, kedaulatan ekonomi
- *Keduanya bertemu dalam konsep: efisiensi sosial, distribusi adil, pengendalian rente, akuntabilitas negara externalities, kesempatan kerja, dampak wilayah, dan keberlanjutan*

Ukuran kebijakan: bukan hanya murah, tetapi siapa yang menikmati manfaat, siapa menanggung biaya, dan apakah ketimpangan turun.

Titik Temu dengan Ekonomi Islam

Maqashid memberi tujuan etik; EK memberi alat ukur dan desain implementasi.



Ruang sinergi konkret: ZISWAF untuk perlindungan sosial produktif, keuangan syariah untuk risk-sharing dan financial inclusion, anti-riba sebagai kritik terhadap eksploitasi, serta etika pasar untuk trust dan keadilan transaksi.

Nilai tanpa instrumen bisa normatif; instrumen tanpa nilai bisa kehilangan arah.

Fondasi normatifnya tetap berbeda. Tetapi dalam substansi masalah, yaitu keadilan, ketimpangan, perlindungan kelompok rentan, trust, risiko, dan kesejahteraan, ruang kerja bersama sangat luas.

Keterbatasan Model Standar Ek Konvensional: Mengakui untuk Memperbaiki

Kekuatan ilmiah tidak berarti bebas dari blind spot.

Asumsi berlebihan

rationality, complete markets, perfect information (berguna sbg benchmark)

Reduksi nilai

well-being sering direduksi menjadi income/utility

Distribution blind spot

rata-rata naik belum tentu keadilan membaik

Power & institutions

pasar sering dibentuk oleh kekuasaan dan aturan

Externalities

kerusakan lingkungan & sosial sering tidak masuk harga

Jawabannya bukan menolak EK, tetapi memperluasnya: behavioral, experimental, institutional, ecological, feminist, regional, dan complexity economics.

Dalam filsafat sains, pengakuan atas kelemahan justru tanda kematangan disiplin, karena teori harus terbuka untuk falsifikasi, koreksi, dan bukti baru

Contoh: Kebijakan Besar Perlu “Policy Laboratory”

Sebelum skala nasional, uji desain, insentif, tata kelola, dan dampaknya.

MBG

desentralisasi operasional, standar gizi, multiplier lokal, risiko tata kelola

Sekolah Rakyat

targeting, kualitas layanan, keberlanjutan fiskal, mobility sosial

KDMP

koperasi desa/kelurahan, insentif anggota, governance, pasar lokal

Rupiah Digital

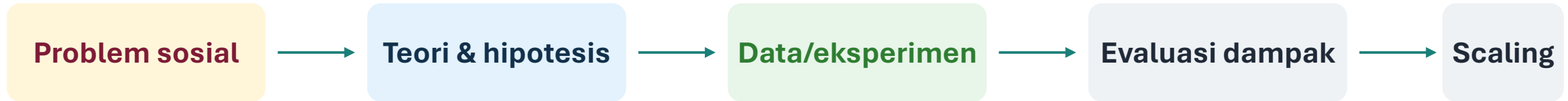
preferensi publik, trust, inclusion, financial stability

EK memberi metode: pilot → RCT/quasi-experiment → dashboard data → evaluasi dampak → scaling adaptif; ukur juga distribusi manfaat, kemiskinan, ketimpangan, dan risiko tata kelola

Prinsip: *sebelum scaling, ciptakan feedback loop agar desain kebijakan belajar dari bukti*

Dari Data ke Kebijakan: Siklus Ilmiah yang Kompatibel dengan Nilai

Ini jembatan antara “ilmu” dan “kemaslahatan/kesejahteraan rakyat”.



Triangulasi: **data** survei, data administrasi, eksperimen, FGD, observasi lapangan, dan teori. Semakin konsisten antar sumber, semakin kuat rekomendasi kebijakan.

Prinsip aksiologis: kebijakan yang efektif *statistically*, harus juga sah secara *substantially* (etik, adil secara sosial, dan berkelanjutan secara fiskal-ekologis).

Merumuskan Komplementaritas: Tiga Peran Berbeda

Ekonomi Pancasila, Islam, dan Konvensional dapat berbagi tugas dalam **satu kerangka kebijakan tanpa mengganggu identik.**

Ekonomi Pancasila KOMPAS

Tujuan nasional: keadilan sosial, kemakmuran rakyat, kebersamaan, kemandirian, Pasal 33.

Ekonomi Islam ETIKA

Maqashid, keadilan transaksi, anti-zalim, ZISWAF, risk-sharing, amanah, kemaslahatan.

Ekonomi Konvensional INSTRUMEN

Model, data, insentif, estimasi dampak, desain kelembagaan, kebijakan fiskal-moneter, evaluasi.

pembagian ini **heuristik (alat bantu berpikir)**, bukan tembok akademik. EP juga memiliki gagasan kelembagaan. EI juga memiliki teori kontrak, keuangan, dan institusi. EK juga tidak sepenuhnya netral nilai (welfare economics dan social choice membahas trade-off normative)

Pembagian kerja intelektual: dalam kebijakan publik kita membutuhkan **tiga pertanyaan sekaligus: arah yang ingin dicapai apa, batas moral dan legitimasi sosialnya apa, dan instrumen apa yang paling efektif untuk mencapainya. Kegagalan biasanya terjadi ketika salah satu dari tiga pertanyaan itu diabaikan.**

Titik temu **bukan peleburan paradigma**, tetapi collaboration of strengths. **Fondasi filosofis berbeda**, namun **bekerja sama pada masalah konkret**: kemiskinan, ketimpangan.. Inilah ruang sintesis EP-EI-EK.

Kebijakan yang baik membutuhkan arah nilai + norma etik + instrumen analitik; inilah ruang sintesis EP-EI-EK.

Implikasi bagi Pembangunan Indonesia yang Berkeadilan Sosial

EK kontemporer dapat memperkuat agenda EP dan EI jika dipakai sebagai alat evaluasi dan desain.

- 1 Ubah debat ideologi menjadi uji kebijakan berbasis bukti; daripada mengatakan satu kebijakan pro-rakyat atau pro-pasar hanya dari label
- 2 Gunakan “efisiensi berkeadilan” sebagai social cost-benefit analysis
- 3 Bangun policy laboratory untuk program besar sebelum scaling nasional
- 4 Ukur dampak pada kemiskinan, ketimpangan, kualitas kerja, lingkungan, dan daerah
- 5 Desain insentif agar moral, tata kelola, dan perilaku selaras. Moral hazard tidak hilang hanya karena tujuan program baik

Pesan Utama

Ekonomi konvensional kontemporer tidak harus dibaca sebagai lawan dari Ekonomi Pancasila atau Ekonomi Islam.

Ketika diperbarui oleh behavioral economics, experimental economics, institutional economics, dan data science, ia justru dapat menjadi alat ilmiah untuk menguji apakah nilai keadilan sosial dan kemaslahatan benar-benar diwujudkan dalam kebijakan.

Nilai memberi arah; ilmu memberi cara; data memberi koreksi; kebijakan berkeadilan sosial membutuhkan ketiganya.

Penajaman Sesuai TOR Baru

Mempertegas enam arah diskusi simposium.

1. Landasan

EK sebagai alat ilmiah untuk membaca pilihan, insentif, kelembagaan, dan dampak kebijakan.

2. Kontribusi

Efisiensi, produktivitas, inovasi, stabilisasi, evaluasi dampak, dan desain kebijakan berbasis bukti.

3. Pembelajaran empiris

Program besar perlu policy laboratory: pilot, data, eksperimen/quasi-experiment, lalu scaling adaptif.

4. Keterbatasan

Pertumbuhan dan efisiensi tidak otomatis menurunkan kemiskinan, ketimpangan, rente, dan eksternalitas.

5. Sinergi

EP memberi kompas konstitusi, EI memberi etika kemaslahatan, EK memberi instrumen analitik.

6. Implikasi

Ukur kebijakan dari manfaat-biaya sosial, distribusi manfaat, keberlanjutan fiskal-ekologis, dan keadilan sosial.

Pesan penguat: ekonomi konvensional tidak diposisikan sebagai pesaing nilai, tetapi sebagai alat untuk menguji apakah nilai benar-benar terwujud dalam kebijakan.

Sumber Rujukan Utama

Disiapkan untuk diskusi, bukan sebagai paper akademik penuh.

- TOR Symposium IAEI, DPP IAEI, 3 Agustus 2026.
- American Economic Association, “What is Economics?”
- Nobel Prize, 2017: Richard H. Thaler, behavioural economics.
- Nobel Prize, 2019: Banerjee, Duflo, Kremer, experimental approach to alleviating poverty.
- Nobel Prize, 2024: Acemoglu, Johnson, Robinson, institutions and prosperity.
- Thomas S. Kuhn (1962), The Structure of Scientific Revolutions.
- Lucas (1976), Kydland & Prescott (1977), Muth (1961), Calvo (1983), Taylor (1980).
- UUD 1945 Pasal 33 dan literatur Ekonomi Pancasila/Ekonomi Islam terkait keadilan sosial dan maqashid syariah.

Terima kasih